

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

A. Kerangka Ekonomi Daerah

Berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia Volume 12 Nomor 2 Bulan Mei 2018, perekonomian nasional pada triwulan I 2018 tumbuh 5,06% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2018 didukung oleh perekonomian Jawa dan KTI yang tumbuh menguat. Sementara perekonomian Sumatera tetap tumbuh solid, meski sedikit melambat dibanding triwulan IV 2017. Berdasarkan hasil asesmen, Bank Indonesia memprakirakan pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada triwulan II 2018, didorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di Jawa dan Sumatera. Perbaikan tersebut bersumber dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor. Secara keseluruhan tahun 2018, perekonomian di seluruh wilayah diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2017, sehingga secara agregat perekonomian Indonesia akan tumbuh dalam kisaran 5,1%-5,5%. Kinerja ekonomi tahun 2018 diprakirakan didorong oleh permintaan domestik yang kuat dan peningkatan investasi.

Inflasi IHK di daerah secara agregat pada triwulan I 2018 tetap terkendali dalam kisaran sasaran. Dibandingkan akhir 2017 inflasi IHK pada triwulan I menurun, didukung oleh penurunan inflasi *adminstered prices* dan inflasi inti yang stabil. Sementara inflasi *volatile food* cenderung meningkat. Memasuki awal triwulan II 2018, inflasi IHK di berbagai wilayah cenderung meningkat didorong oleh inflasi *volatile food*, terutama pada komoditi bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Ke depan, tekanan inflasi *volatile food* masih perlu diwaspadai seiring tekanan permintaan saat Ramadhan dan HBKN Idul Fitri. Capaian inflasi IHK 2018 diprakirakan masih akan lebih rendah dibandingkan 2017 dan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 3,5%±1%.

Pada triwulan I 2018, perekonomian Jawa Tengah mencatatkan pertumbuhan yang relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,41% (yoy), stabil dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya (5,40%; yoy). Capaian tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat pada level 5,06% (yoy); namun masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kawasan Jawa yang meningkat menjadi sebesar 5,78% (yoy).

Ditinjau dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Jawa Tengah di triwulan I 2018 didorong oleh konsumsi swasta yang tetap kuat, tercermin dari peningkatan pertumbuhan pada komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR). Sementara kinerja investasi, ekspor luar negeri, dan konsumsi pemerintah

tetap tumbuh meskipun melambat dari triwulan sebelumnya. Sementara dari sisi lapangan usaha, tiga lapangan usaha utama di Jawa Tengah yaitu pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan mencatatkan peningkatan pertumbuhan, sehingga menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, perlambatan pertumbuhan yang cukup signifikan pada lapangan usaha konstruksi serta lapangan usaha informasi dan komunikasi, menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi pada periode laporan, sehingga secara umum kinerja perekonomian Jawa Tengah di triwulan I 2018 terpantau stabil.

Inflasi tahunan Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2018 tercatat sebesar 3,39% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2017 (3,71; yoy). Secara triwulanan, Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 1,24% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2017 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,95% (qtq). Berdasarkan disagregasi inflasi, peningkatan laju inflasi tahunan pada triwulan I 2018 terutama disebabkan oleh kelompok *volatile food* yang mengalami inflasi sebesar 4,73% (yoy). Inflasi pada kelompok *volatile food* didorong oleh terjadinya peningkatan berbagai harga makanan akibat penurunan pasokannya.

Sementara itu, pada triwulan laporan kelompok *administered prices* tercatat mengalami penurunan inflasi tahunan maupun triwulanan. Inflasi tahunan kelompok *administered prices* terutama berasal dari kelompok transportasi serta kelompok bahan bakar, penerangan, dan air. Dampak kenaikan tarif listrik pada awal tahun 2017 mereda hingga triwulan I 2018. Demikian pula penurunan inflasi juga berasal dari subkelompok transportasi yang di sebabkan oleh penurunan kembali normalnya berbagai tarif angkutan pasca lebaran serta meredanya dampak inflasi biaya perpanjangan STNK yang meningkat tinggi pada tahun 2017.

Selanjutnya, kelompok inti juga menunjukkan penurunan laju inflasi pada triwulan berjalan. Penurunan inflasi inti utamanya disebabkan oleh factor permintaan domestik yang menurun pada triwulan I 2018. Inflasi kelompok *inti-traded* menunjukkan perlambatan pada triwulan ini dibandingkan triwulan IV 2017 lalu yang mengindikasikan fenomena penurunan permintaan impor barang dan jasa dari luar negeri.

B. Kerangka Ekonomi Daerah

Penyusunan perubahan kerangka ekonomi daerah tahun 2018 dilakukan sebagai upaya untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan menampung perubahan kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD tahun 2018. Selain itu, perubahan kerangka ekonomi daerah tahun 2018 juga dimaksudkan untuk menampung inisiatif-

inisiatif baru sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah disusun berdasarkan pergeseran asumsi kerangka ekonomi nasional, provinsi, dan regional, serta perkembangan ekonomi tahun sebelumnya. Mendasarkan pada kondisi perekonomian baik nasional, provinsi maupun regional tahun 2018 serta tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang, maka prospek perekonomian pada tahun 2018 merujuk pada capaian indikator makro dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2018 atas dasar harga konstan diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar $5 \pm 1\%$;
- b. Laju Inflasi pada Tahun 2018 diproyeksikan dapat dikendalikan pada kisaran angka dua digit yaitu sekitar $3 \pm 1\%$. Perkembangan harga atau tingkat inflasi di Kabupaten Kebumen yang berfluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian regional dan nasional;
- c. Persentase penduduk miskin pada tahun 2018 diproyeksikan adalah sebesar 19,38%;
- d. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 diprediksi sebesar $3 \pm 1\%$.
- e. Indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2018 diprediksi lebih besar dari tahun 2016 yaitu lebih besar dari 69,98.

Dinamisnya kondisi perekonomian di tingkat nasional berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian, terutama pada belanja pemerintah yang dapat merangsang atau menstimulasi stabilitas kemampuan daya beli masyarakat dan meningkatkan kemampuan produksi masyarakat agar terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan dan perubahan keadaan nilai inflasi pada tingkat nasional mempengaruhi perkembangan inflasi pada tingkat daerah. Peningkatan inflasi akan mendorong peningkatan suku bunga pinjaman bank sehingga mendorong penurunan investasi, dan pada gilirannya akan mengakibatkan permasalahan peluang penyerapan lapangan kerja, dengan demikian akan mempengaruhi pengurangan belanja modal.

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kabupaten Kebumen
Perubahan RKPD Tahun 2018

NO.	URAIAN	RKPD 2018	RKPD-P 2018
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	$6 \pm 1\%$	$5 \pm 1\%$
2.	Inflasi (%)	$3 \pm 1\%$	$3 \pm 1\%$
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	17,74	19,37
4.	Tingkat Pengangguran	2,03%	$3 \pm 1\%$

NO.	URAIAN	RKPD 2018	RKPD-P 2018
	Terbuka (%)		
5.	Indeks Pembangunan Manusia	69,98	69,98*

Sumber : RKPD Tahun 2018 dan RKPD Tahun 2019

Keterangan : *IPM menggunakan data tahun 2016 (BPS)

Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah paling substantif dan esensial yang harus ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2018 adalah pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan tahunan maupun jangka menengah. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan Perubahan RKPD Tahun 2018 juga harus dilakukan baik pada sisi pendapatan maupun pembiayaan.

C. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada bidang pendapatan daerah, kerangka ekonomi daerah yang tercantum dalam Nota Keuangan APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2018, yang secara langsung terkait dengan upaya penambahan pendapatan adalah :

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah;
- c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi dengan memantapkan pelaksanaan Pendaerahan pajak pusat sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah dan cepat;
- e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta instansi lainnya dan wajib pajak melalui peningkatan pelayanan;
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja;
- g. perencanaan pendapatan yang lebih baik dan terukur dengan peningkatan kapasitas pendapatan daerah; dan
- h. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari hasil pungutan pendapatan daerah maupun pungutan yang tidak semestinya.

Meskipun kebijakan pendapatan daerah yang tertuang dalam APBD tahun 2018 tidak mengalami perubahan, namun anggaran pendapatan tahun 2018 diproyeksikan mengalami perubahan baik peningkatan maupun penurunan di beberapa pos.

Perubahan anggaran pendapatan diproyeksikan pada kelompok-kelompok sebagai berikut :

Tabel 3.2
Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan
Kabupaten Kebumen Tahun 2018

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
I	Pendapatan Asli Daerah	337.501.788.000	375.757.125.950	38.255.337.950	11,33%
I.1	Pajak Daerah	66.390.075.000	91.887.185.000	25.497.110.000	38,41%
I.2	Retribusi Daerah	35.559.500.000	59.293.847.950	23.734.347.950	66,75%
I.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.063.000.000	9.629.329.000	(1.433.671.000)	-12,96%
I.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	224.489.213.000	214.946.764.000	(9.542.449.000)	-4,25%
II.	Dana Perimbangan	1.962.379.393.000	1.666.579.609.000	(295.799.784.000)	-15,07%
II.1	Dana Bagi Hasil	46.511.068.000	36.993.355.000	(9.517.713.000)	-20,46%
II.2	Dana Alokasi Umum	1.342.360.137.000	1.234.003.169.000	(108.356.968.000)	-8,07%
II.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	573.508.188.000	395.583.085.000	(177.925.103.000)	-31,02%
III.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	585.274.287.000	618.539.616.000	33.265.329.000	5,68%
III.1	Hibah	1.500.000.000	123.947.600.000	122.447.600.000	8163,17%
III.2	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota	119.862.495.000	120.539.532.000	677.037.000	0,56%
III.3	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus	51.141.752.000		(51.141.752.000)	-100,00%
III.4	Bantuan keuangan dari provinsi/ pemerintah daerah lainnya	40.000.000.000	23.361.305.000	(16.638.695.000)	-41,60%
III.5	Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN	372.770.040.000	350.691.179.000	(22.078.861.000)	-5,92%
	TOTAL PENDAPATAN	2.885.155.468.000	2.660.876.350.950	(224.279.117.050)	-7,77%

Sumber : BPKAD dan BAP3DA, 2018

D. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Adapun kebijakan umum perubahan belanja daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 antara lain:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- c. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan;
- d. Belanja daerah juga diarahkan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- e. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk meminimalisir sumber ketidakefisienan dan ketidakefektifan keuangan daerah;
- f. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- g. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang optimal dengan biaya seminimal mungkin;
- h. Penganggaran keuangan daerah diarahkan untuk dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value of money* yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap SKPD;

Tabel 3.3
Proyeksi Perubahan Anggaran Belanja
Kabupaten Kebumen Tahun 2018

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
I	Belanja Tidak Langsung	1.841.235.054.000	1.727.754.755.000	(114.176.979.000)	-6,20%
I.1	Belanja Pegawai	1.203.560.808.000	1.138.885.337.000	(64.675.471.000)	-5,37%
I.2	Belanja Hibah	39.404.000.000	31.871.200.000	(7.532.800.000)	-19,12%
I.3	Belanja Bantuan Sosial	64.015.900.000	46.964.354.000	(17.051.546.000)	-26,64%
I.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.949.969.000	14.134.649.000	6.184.680.000	77,80%

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
I.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	525.001.057.000	493.883.385.000	(31.117.672.000)	-5,93%
I.6	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.015.830.000	15.830.000	0,79%
II	Belanja Langsung	1.142.156.561.000	1.147.007.090.950	4.850.529.950	0,42%
II.1	Belanja Pegawai	60.398.611.000	60.655.113.000	256.562.000	0,42%
II.2	Belanja Barang dan Jasa	517.828.945.000	520.028.070.000	2.199.125.000	0,42%
II.3	Belanja Modal	563.232.325.000	565.624.269.000	2.391.944.000	0,42%
	TOTAL BELANJA	2.983.391.615.000	2.874.761.845.950	(109.326.449.050)	-3,66%

Sumber : BPKAD dan BAP3DA, 2018

E. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah perubahan kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

- a. Optimalisasi sumber-sumber penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan untuk menutup defisit anggaran atau memperkuat surplus anggaran daerah.
- b. Optimalisasi pembiayaan daerah untuk menampung semua jenis penerimaan daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan daerah dan semua jenis pengeluaran yang tidak dapat dikategorikan sebagai belanja daerah.

Tabel 3.4
Proyeksi Perubahan Pembiayaan
Kabupaten Kebumen Tahun 2018

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp)	%
I	Penerimaan Pembiayaan	110.986.147.000	225.635.495.000	114.649.348.000	103,30%
I.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	108.486.147.000	224.135.495.000	115.649.348.000	106,60%
I.2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	2.500.000.000	1.500.000.000	(1.000.000.000)	-40,00%
II	Pengeluaran pembiayaan	12.750.000.000	11.750.000.000	(1.000.000.000)	-7,84%
II.1	Penyertaan modal (investasi) daerah	10.250.000.000	10.250.000.000		
II.2	Penyediaan Dana Talangan Pangan	2.500.000.000	1.500.000.000	(1.000.000.000)	-40,00%
	Pembiayaan Netto	98.236.147.000	213.885.495.000	115.649.348.000	117,73%

Sumber : BPKAD dan BAP3DA, 2018